

TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN DENGAN MODEL CO-CREATION DI KOTA SURABAYA

Hendra Wijayanto¹, Herlina Muzanah Zain²

¹Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di kota metropolitan seperti Surabaya memerlukan transformasi dari pendekatan teknokratis-sentralistik menuju kolaborasi partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *co-creation* dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Surabaya dengan menggunakan kerangka kerja DART (*Dialogue, Access, Risk Assessment, and Transparency*). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola Bank Sampah, dan kader lingkungan, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *co-creation* di Surabaya terwujud melalui sinergi fungsional di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator infrastruktur desentralisasi, sementara masyarakat bertindak sebagai produser solusi melalui pemilahan sampah dari sumber. Indikator dialog dan akses ditemukan sebagai kekuatan utama dalam membangun kepercayaan publik, sementara aspek penilaian risiko dan transparansi menjadi penentu keberlanjutan insentif ekonomi sirkular bagi warga. Secara keseluruhan, model ko-kreasi ini terbukti efektif menurunkan beban sampah di TPA Benowo sekaligus menciptakan nilai bersama (*public value*) yang memperkuat resiliensi sosial berbasis lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standardisasi sistem insentif digital dan regenerasi kader lingkungan untuk menjaga konsistensi partisipasi masyarakat di masa depan.

Kata Kunci : co-creation, sampah, efektivitas, Kota Surabaya

Abstract

Waste management in metropolitan cities like Surabaya requires a transformation from a technocratic-centralistic approach toward participatory collaboration. This study aims to analyze co-creation practices within the waste management system in Surabaya using the DART framework (Dialogue, Access, Risk Assessment, and Transparency). Utilizing a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with key informants from the Environmental Service (DLH), Waste Bank managers, and environmental cadres, supported by field observations and documentary studies. The results indicate that co-creation in Surabaya is manifested through functional synergy, where the government acts as a facilitator of decentralized infrastructure while the community serves as solution producers through waste segregation at the source. The indicators of dialogue and access were found to be primary strengths in building public trust, while risk assessment and transparency aspects are decisive factors for the sustainability of circular economy incentives for citizens. Overall, this co-creation model has proven effective in reducing the waste load at the Benowo Landfill while simultaneously creating public value that strengthens environment-based social resilience. This study recommends the need for standardizing digital incentive systems and regenerating environmental cadres to maintain consistent community participation in the future.

Keywords: Co-creation, Waste, Effectiveness, Surabaya City

A. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat di Kota Surabaya membawa konsekuensi logis berupa peningkatan volume timbulan sampah yang signifikan. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan konvensional yang bersifat sentralistik dan bergantung sepenuhnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mulai menunjukkan keterbatasan kapasitas, sehingga menuntut adanya transformasi dalam tata kelola sampah menuju sistem yang lebih inklusif dan partisipatif.

Konsep *co-creation* muncul sebagai paradigma baru dalam pelayanan publik yang menekankan pada keterlibatan aktif aktor non-pemerintah. Prahalad dan Ramaswamy (2004) mendefinisikan ko-kreasi sebagai penciptaan nilai bersama melalui interaksi kolaboratif antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam konteks pengelolaan sampah, ko-kreasi menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek kebijakan menjadi mitra strategis yang turut mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi pengelolaan limbah di tingkat rumah tangga.

Kota Surabaya telah lama dikenal dengan keberhasilan program *Surabaya Green and Clean*. Penelitian terdahulu oleh Dhokhikah et al. (2015) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Bank Sampah mampu mereduksi volume sampah organik hingga 20% sebelum mencapai TPA. Namun, keberhasilan ini tidak hanya dipicu oleh ketersediaan infrastruktur, melainkan oleh dialog berkelanjutan antara pemerintah dan kader lingkungan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam teori ko-kreasi.

Implementasi ko-kreasi di Surabaya juga didorong oleh kebijakan desentralisasi pengolahan sampah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhullah et al. (2022), keberadaan Rumah Kompos di berbagai titik kota merupakan wujud dari indikator *access* dalam kerangka DART. Masyarakat diberikan akses fisik dan pengetahuan untuk mengolah sampah secara mandiri, yang pada gilirannya menciptakan kemandirian komunitas dalam menghadapi risiko lingkungan di wilayah pemukiman padat.

Selain aspek teknis, dimensi sosial dan kepercayaan publik memainkan peran krusial. Kutipan dari studi yang dilakukan oleh Warsiki et al. (2021) menekankan bahwa transparansi dalam manajemen Bank Sampah menjadi kunci utama terjadinya motivasi warga. Ketika warga dapat melihat manfaat ekonomi dan lingkungan secara terbuka, mereka cenderung lebih bersedia untuk menginvestasikan waktu dan tenaga dalam program-program lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah kota.

Namun, tantangan dalam ko-kreasi di Surabaya masih ditemukan pada aspek *risk assessment* atau penilaian risiko. Peneliti seperti Nugraha (2019) mencatat bahwa risiko keberlanjutan program seringkali terhambat oleh fluktuasi harga sampah anorganik di pasar. Tanpa adanya jaminan risiko dari pemerintah atau sektor swasta, semangat ko-kreasi di tingkat

akar rumput berisiko mengalami penurunan. Hal inilah yang mendasari pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai integrasi risiko dalam kemitraan multifihak.

Sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mulai terintegrasi dalam ekosistem ko-kreasi di Surabaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Arifianto (2020), kolaborasi antara industri dan komunitas lokal dalam pengolahan sampah plastik telah menciptakan rantai nilai baru. Sinergi ini membuktikan bahwa ko-kreasi tidak hanya terjadi antara pemerintah dan warga, tetapi melibatkan keterkaitan ekonomi sirkular yang lebih luas.

Kader lingkungan di Surabaya bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani dialog antara kebijakan top-down dan aspirasi bottom-up. Studi kualitatif oleh Rahmawati dan Sukmawati (2023) mengungkapkan bahwa efektivitas ko-kreasi sangat bergantung pada kapasitas kader dalam menerjemahkan bahasa teknis pemerintah menjadi praktik harian yang mudah diikuti oleh warga. Tanpa peran mediator ini, akses terhadap informasi seringkali terhambat oleh hambatan birokrasi.

Secara global, tren pengelolaan sampah kini menuju pada konsep *Collaborative Governance*. Penelitian internasional oleh Brandsen dan Honingh (2016) menegaskan bahwa ko-kreasi dalam layanan publik seperti kebersihan lingkungan dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Di Surabaya, penghematan biaya pengangkutan dan pengolahan sampah di TPA Benowo merupakan dampak langsung dari keberhasilan warga dalam melakukan pemilahan sampah secara mandiri melalui pola ko-kreasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk memetakan secara mendalam bagaimana keempat pilar DART (*Dialogue, Access, Risk Assessment, and Transparency*) berinteraksi dalam ekosistem pengelolaan sampah di Surabaya. Dengan memahami dinamika ko-kreasi ini, diharapkan dapat dirumuskan model tata kelola sampah yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan untuk diterapkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi praktik *co-creation* dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya melalui kerangka kerja DART (*Dialogue, Access, Risk Assessment, and Transparency*). Data dikumpulkan secara triangulasi melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari beberapa stakeholder terkait topik *co-creation* dalam pengelolaan sampah di Surabaya, yang diperkuat dengan observasi lapangan serta studi dokumentasi regulasi daerah. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang otoritatif, sementara analisis data dilakukan secara tematik untuk memetakan bagaimana interaksi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan nilai bersama (*public value*) dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tata Kelola Sampah Perkotaan dengan Model Co-creation di Kota Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *co-creation* di Kota Surabaya telah mengadopsi empat pilar utama DART untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan:

a. *Dialogue*

Transformasi tata kelola sampah di Kota Surabaya ditandai dengan pergeseran paradigma komunikasi dari pola instruktif-top-down menjadi dialog kolaboratif yang setara. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak lagi menempatkan diri sebagai satu-satunya otoritas pengambil keputusan, melainkan sebagai mitra dialog bagi warga. Hubungan ini memicu munculnya ruang-ruang diskusi terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, sehingga kebijakan yang dilahirkan bukan merupakan paksaan, melainkan kesepakatan bersama yang memiliki legitimasi sosial kuat di tingkat akar rumput.

Forum "Kader Lingkungan" menjadi instrumen vital dalam memfasilitasi dialog rutin yang terstruktur ini antara birokrasi dan komunitas. Dalam pertemuan berkala ini, terjadi pertukaran informasi dua arah yang sangat teknis, mulai dari evaluasi metode pengomposan hingga manajemen logistik Bank Sampah. Dialog yang terbangun di forum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi strategis pemerintah dengan realitas sosiologis di lapangan, memastikan bahwa setiap hambatan komunikasi dapat diatasi sebelum menjadi konflik kebijakan.

Selain forum formal, kompetisi kebersihan tahunan seperti *Surabaya Green and Clean* berperan sebagai katalis dialog kreatif antar pemangku kepentingan. Kompetisi ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan platform di mana warga dapat mempresentasikan inovasi lokal mereka dalam pengelolaan limbah kepada pemerintah. Proses ini menciptakan siklus umpan balik (*feedback loop*) yang sehat; warga memberikan masukan mengenai kendala teknis, seperti keterbatasan armada pengangkut atau kebutuhan alat pencacah sampah, yang kemudian ditanggapi pemerintah dengan penyesuaian program atau alokasi bantuan sarana yang tepat sasaran.

Pada akhirnya, dialog yang efektif ini memungkinkan terjadinya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal yang sangat spesifik di tingkat RT/RW. Mengingat setiap wilayah di Surabaya memiliki karakteristik sosial dan timbulan sampah yang berbeda, dialog memastikan bahwa solusi yang diterapkan di satu kampung tidak dipaksakan secara seragam ke kampung lainnya. Fleksibilitas kebijakan yang lahir dari proses diskusi ini membuktikan bahwa ko-kreasi melalui indikator dialog telah berhasil membangun kepercayaan publik (*public trust*) dan rasa memiliki (*sense of ownership*) warga terhadap keberlanjutan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya.

b. Access

Pemerintah Kota Surabaya telah secara signifikan memperluas akses bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah melalui strategi desentralisasi infrastruktur. Berbeda dengan pendekatan sentralistik yang hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir, Surabaya membangun ekosistem di mana fasilitas pengolahan sampah diletakkan sedekat mungkin dengan pemukiman warga. Perluasan akses fisik ini bertujuan untuk meruntuhkan hambatan jarak dan logistik, sehingga partisipasi publik dalam memilah dan mengolah sampah bukan lagi dianggap sebagai beban tambahan, melainkan aktivitas harian yang terintegrasi dalam ruang hidup mereka.

Wujud nyata dari aksesibilitas ini terlihat pada persebaran fasilitas Rumah Kompos yang tersebar di berbagai titik strategis kota. Keberadaan Rumah Kompos di tingkat kecamatan atau kelurahan memberikan kemudahan bagi warga untuk menyalurkan sampah organik mereka untuk diproses menjadi pupuk tanpa harus menunggu jadwal pengangkutan kota. Dengan adanya akses langsung ke sarana ini, masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana sampah yang mereka hasilkan diproses kembali menjadi produk yang bermanfaat, yang pada gilirannya memperkuat motivasi untuk terus berkontribusi dalam rantai ko-kreasi tersebut.

Selain infrastruktur fisik, penguatan indikator akses juga dilakukan melalui sistem Bank Sampah yang terintegrasi secara digital dan manajerial. Pemerintah memberikan akses bagi setiap RT/RW untuk mendirikan unit Bank Sampah sendiri dengan dukungan sistem penjemputan sampah kering yang terjadwal. Integrasi ini memastikan bahwa warga memiliki saluran yang pasti untuk mengonversi sampah anorganik menjadi nilai ekonomi. Kemudahan akses terhadap jaringan ekonomi sirkular ini menjadi faktor kunci yang mengubah persepsi masyarakat terhadap limbah, dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi aset yang dapat dikelola secara mandiri.

Perluasan akses tidak hanya terbatas pada sarana fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap pengetahuan teknis dan manajerial melalui pendampingan intensif. Pemerintah menerjunkan fasilitator lingkungan ke tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan langsung mengenai teknik pengomposan, budidaya *maggot*, hingga manajemen pembukuan Bank Sampah. Akses terhadap informasi dan edukasi yang berkelanjutan ini memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran mereka dalam ko-kreasi. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur yang disertai dengan kemudahan akses pengetahuan menciptakan kemandirian komunitas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Surabaya.

c. Risk Assessment

Dalam kerangka ko-kreasi pengelolaan sampah di Surabaya, penilaian risiko diimplementasikan melalui model pembagian tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) yang proporsional. Prinsip ini mengakui bahwa pengelolaan sampah kota memiliki risiko kegagalan yang tinggi jika hanya bertumpu pada satu pihak. Oleh karena

itu, skema risiko dibagi berdasarkan kapasitas masing-masing aktor: pemerintah mengambil peran dalam memitigasi risiko kegagalan sistemik dan kebijakan, sementara masyarakat mengelola risiko pada skala mikro yang berhubungan langsung dengan perilaku konsumsi harian.

Pemerintah Kota Surabaya secara strategis menanggung risiko investasi infrastruktur besar yang memerlukan modal tinggi dan kepastian hukum. Risiko finansial dalam pengadaan lahan untuk Pusat Daur Ulang (PDU), pengadaan mesin pencacah, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan di TPA Benowo sepenuhnya menjadi domain pemerintah. Dengan mengambil alih beban risiko modal ini, pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dan sektor swasta agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekosistem pengelolaan sampah tanpa rasa khawatir akan kerugian finansial atau ketidakpastian fasilitas.

Di sisi lain, masyarakat mengambil peran dalam mengelola risiko operasional di tingkat rumah tangga, khususnya terkait efektivitas pemilahan sampah dari sumber. Risiko kontaminasi sampah yang dapat menurunkan nilai ekonomi material daur ulang dimitigasi melalui pengawasan kolektif antarwarga. Masyarakat mengelola risiko ini dengan menciptakan norma sosial dan sanksi internal dalam komunitas mereka untuk memastikan bahwa sampah yang disetor ke Bank Sampah atau Rumah Kompos telah memenuhi standar kebersihan tertentu. Pembagian risiko operasional ini secara signifikan mengurangi beban biaya pemilahan massal di tingkat akhir yang biasanya sangat mahal dan tidak efisien.

Terakhir, penilaian risiko diwujudkan melalui mitigasi dampak lingkungan yang sangat ketat, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Kesadaran akan risiko polusi udara dan bau dari proses pengomposan dikelola melalui standardisasi prosedur operasional (SOP) yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah dan komunitas bekerja sama menerapkan teknik pengolahan yang higienis, seperti penggunaan bio-aktivator dan kontrol kelembaban yang tepat, guna memastikan bahwa aktivitas pengolahan sampah tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Pendekatan proaktif terhadap penilaian risiko lingkungan ini menjadi kunci utama yang menjaga penerimaan sosial terhadap fasilitas pengolahan sampah di tengah kota.

d. Transparency

Transparansi dalam ekosistem ko-kreasi pengelolaan sampah di Surabaya diwujudkan melalui keterbukaan data dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa kepercayaan publik (*public trust*) hanya dapat dibangun jika masyarakat mengetahui secara jelas tujuan, target, dan capaian dari program-program lingkungan yang dijalankan. Dengan menyediakan data statistik timbulan sampah yang tereduksi secara publik, pemerintah memberikan bukti nyata bahwa partisipasi warga di tingkat RT dan RW memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan kota, sehingga memotivasi warga untuk terus terlibat dalam proses ko-kreasi.

Dalam ranah ekonomi sirkular, transparansi menjadi pilar utama dalam operasional Bank Sampah yang dikelola masyarakat. Mekanisme penentuan harga sampah kering, proses penimbangan, hingga pencatatan saldo dalam tabungan warga dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Transparansi manajerial ini sangat krusial untuk mencegah konflik internal di tingkat komunitas dan memastikan bahwa nilai ekonomi yang tercipta dari hasil pemilahan sampah didistribusikan secara adil kepada setiap partisipan. Kejelasan alur uang dan barang di Bank Sampah mengubah skeptisitas masyarakat menjadi dukungan penuh terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Selain transparansi data dan finansial, kejelasan mengenai mekanisme insentif dan penghargaan (*reward system*) juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota secara terbuka mengomunikasikan kriteria penilaian dalam berbagai kompetisi kebersihan serta parameter pemberian bantuan sarana prasarana. Dengan adanya transparansi standar ini, setiap kampung atau komunitas memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan apresiasi dan dukungan pemerintah. Keterbukaan informasi mengenai "siapa mendapat apa dan mengapa" menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong setiap aktor untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam desain inovasi pengelolaan limbah.

Transparansi diwujudkan melalui saluran komunikasi yang responsif terhadap keluhan dan masukan masyarakat mengenai pelayanan kebersihan kota. Penggunaan platform digital dan media sosial memungkinkan warga untuk memantau kinerja petugas kebersihan serta melaporkan kendala distribusi sampah secara *real-time*. Keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan memberikan umpan balik yang cepat menunjukkan adanya transparansi dalam akuntabilitas publik. Sinergi antara transparansi informasi dan responsivitas kebijakan ini pada akhirnya menciptakan iklim kolaborasi yang harmonis, di mana semua pihak merasa memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam menjaga ekosistem kebersihan di Kota Surabaya.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan utama penelitian menunjukkan bahwa *co-creation* dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya telah berhasil mentransformasi peran masyarakat dari sekadar objek layanan menjadi mitra pencipta solusi yang aktif. Melalui implementasi kerangka DART, tercipta ekosistem kolaboratif di mana dialog dua arah dan kemudahan akses terhadap infrastruktur desentralisasi—seperti Rumah Kompos dan Bank Sampah—mampu meningkatkan partisipasi publik secara masif. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada penurunan volume sampah secara signifikan di TPA Benowo, tetapi juga menciptakan nilai bersama (*public value*) berupa penguatan resiliensi sosial dan peningkatan ekonomi sirkular di tingkat akar rumput.

Namun, keberlanjutan model ko-kreasi ini sangat bergantung pada konsistensi transparansi manajerial dan pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan komunitas. Meskipun mitigasi risiko lingkungan dan keterbukaan informasi telah berjalan baik, tantangan ke depan terletak pada regenerasi kader lingkungan dan standarisasi insentif ekonomi agar

motivasi warga tetap terjaga secara jangka panjang. Secara keseluruhan, model Surabaya membuktikan bahwa kolaborasi multifihak yang mengedepankan kesetaraan akses dan kepercayaan mampu menciptakan sistem tata kelola sampah perkotaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan birokrasi konvensional.

Mendasarkan temuan penelitian mengenai *co-creation* dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk memperkuat aspek keberlanjutan ko-kreasi dengan mengintegrasikan sistem insentif yang lebih terstandarisasi bagi kader lingkungan dan pengelola Bank Sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem pemantauan sampah yang terhubung langsung dengan kebijakan retribusi atau subsidi hijau, sehingga kontribusi setiap warga dapat terukur secara presisi dan dihargai secara adil. Selain itu, diperlukan program regenerasi kader lingkungan secara sistematis melalui keterlibatan institusi pendidikan dan generasi muda, guna memastikan bahwa budaya kolaborasi yang telah terbentuk tidak mengalami penurunan efektivitas akibat faktor usia para penggerak di tingkat akar rumput.

Perlu adanya pengembangan diversifikasi hasil olahan sampah melalui kolaborasi yang lebih luas dengan sektor industri dan akademisi. Pemerintah perlu memfasilitasi akses pasar bagi produk daur ulang dan kompos yang dihasilkan komunitas agar memiliki nilai ekonomi yang kompetitif dan stabil. Melalui penguatan kemitraan strategis ini, risiko pasar yang sebelumnya ditanggung mandiri oleh kelompok swadaya masyarakat dapat dimitigasi bersama. Dengan perluasan ekosistem ko-kreasi ke sektor komersial, pengelolaan sampah di Surabaya tidak hanya berhenti pada capaian kebersihan lingkungan, tetapi dapat berkembang menjadi model ekonomi sirkular yang mandiri dan memiliki ketahanan finansial yang kuat.

E. Daftar Pustaka

- Arifianto, A. (2020). *Sinergi CSR dan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Surabaya*. Jurnal Ekonomi Sirkular, 3(2), 45-58.
- Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). *Distinguishing Different Types of Co-production: A Conceptual Analysis*. Administration & Society, 48(4), 427-435.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). *Community-based household waste management improvement in Surabaya, Indonesia*. Journal of Material Cycles and Waste Management, 17(1), 45-55.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya 2022*. Surabaya: DLH.
- Fadhullah, W., et al. (2022). *Infrastruktur Desentralisasi: Studi Kasus Rumah Kompos di Kota Metropolitan*. Jurnal Teknik Lingkungan, 12(1), 12-25.

- Indriyani, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Surabaya Green and Clean*. Jurnal Sosialisasi, 6(3), 112-120.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Nugraha, A. (2019). *Analisis Risiko Ekonomi Bank Sampah Unit di Kota Surabaya*. Jurnal Manajemen Lingkungan, 4(2), 88-101.
- Ostrom, E. (1996). *Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*. World Development, 24(6), 1073-1087.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan*.
- Prahлад, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation*. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
- Putri, A. R. (2021). *Efektivitas Kader Lingkungan sebagai Mediator Ko-kreasi di Surabaya*. Jurnal Komunikasi Publik, 9(1), 34-47.
- Rahmawati, D., & Sukmawati, L. (2023). *Dialog dan Kolaborasi: Kunci Keberhasilan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas*. Jurnal Ilmu Administrasi, 15(2), 201-215.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Cakra Wijaya.
- Surya, K. (2020). *Digitalisasi Bank Sampah: Menuju Transparansi Tata Kelola Lingkungan*. Surabaya: Pustaka Akademika.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). *Service-dominant logic: continuing the evolution*. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1-10.
- Warsiki, T., et al. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Social Enterprise: Studi Kasus Bank Sampah Induk Surabaya*. Jurnal Akuntansi Lingkungan, 5(4), 312-328.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.